



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB**

**BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan, laporan ini dibuat sebagai salah satu pendukung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun 2018.

Penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah laporan atas penyelenggaraan urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 (satu) tahun anggaran 2018 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Selain itu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah.

Demikian Laporan ini dibuat semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun 2018.

Tanjung Redeb, Januari 2019
An. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Berau
SEKRETARIS,

MUHAMMAD SYAFEI, SH
NIP. 19641111 199303 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1
C. Nama Perangkat Daerah	1
D. Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Yang Dilaksanakan	2
E. Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas kependudukan dan catatan sipil	2
F. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah	3

BAB II URUSAN KENKUREN

A. Organisasi Perangkat Daerah	12
B. Program dan Kegiatan	12
C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	14
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran	16
E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	21
F. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan	21
G. Permasalahan dan Solusi	23

BAB III REALISASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2018

1. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	24
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran	24
3. Permasalahan dan Solusi	25

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

A. Mitra yang Diajak Kerjasama	28
B. Dasar Hukum	28
A. Bidang Kerjasama	28
C. Nama Kegiatan	28
D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	28
E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	29
F. Sumber dan Jumlah Anggaran	29
G. Jangka Waktu Kerjasama	29

BAB VI	GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KABUPATEN BERAU	
BAB VII	PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI	
BAB VII	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	38
	B. Saran	39

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B. Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu yang melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, telah melakukan beberapa program kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari RPJM Kabupaten Berau periode 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Rutin dan 16 kegiatan rutin dan 1 (satu) Program Tehnis dan 12 (duabelas) Kegiatan. Jadi secara keseluruhan tahun 2018 terdapat 4 (empat) program dan 28 (duapuluh delapan) Kegiatan. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.621.207.000
	1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	500.000
	2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	199.550.000
	3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	177.623.000
	4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	106.038.000



	5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	3.110.000
	6. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.642.000
	7. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	513.629.000
	8. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.500.000
	9. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.000.000
	10. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	176.175.000
	11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	20.000.000
	12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000
	13. Kegiatan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	85.000.000
	14. Kegiatan penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	1.101.440.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000
	15. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000
	16. Kegiatan penyusunan dokumenn perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	20.000.000
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.670.181.200
	17. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).	107.000.000
	18. Kegiatan peningkatan pelayanan public di bidang pendaftaran penduduk	610.000.000
	19. Kegiatan pengembangan database kependudukan	109.143.200
	20. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.014.378.000
	21. Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil	263.100.000
	22. Kegiatan pengawasan dan pengendalian penduduk	138.260.000
	23. Kegiatan peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian	75.000.000
	24. Kegiatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	95.000.000
	25. Kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	98.300.000
	26. Kegiatan peningkatan sarana dan	50.000.000



	prasarana SIAK Kabupaten	
	27. Kegiatan peningkatan kerjasama linstas sektoral pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	60.000.000
	28. Kegiatan publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil	50.000.000

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan 76 personal dengan 42 PNS dan 2 PTT serta 33 Honor kontrak harian lepas.

Jumlah pegawai, klasifikasi menurut pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Jumlah pegawai
1.	Sekretariat	18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	15
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	10
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	8
	Jumlah Keseluruhan	77

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2018 berdasarkan pendidikan

No.	Uraian	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Sekretariat		7		11		18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	8	2	15		26
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		6	2	7		15



4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		2	1	6	1	10
5	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan		2		6		8
Jumlah Keseluruhan							77

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 2.4
Jumlah pegawai per 31 Desember berdasarkan golongan

No.	Uraian	Golongan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1.	Sekretariat		3	7	1	11
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2	7		9
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			8		8
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		1	5	1	7
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan		2	4	1	7
Jumlah Keseluruhan						42

d. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai per 31 Desember berdasarkan jabatan

No.	Uraian	JFU	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
1.	Sekretariat	14		1	3	18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	23			3	26
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	12			3	15
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	6		1	3	10
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan	4		1	3	8
		59		4	14	77

e. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

Tabel 2.4
Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No	Uraian	Pejabat memenuhi syarat kepangkatan	Jumlah jabatan yang ada
1	Sekretariat	4	5
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	4
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	4
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	4	4
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	4	4
		18	21

f. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

Tabel 2.5.
Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

No	Uraian	Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim	Jumlah jabatan yang ada
1	Sekretariat	4	5
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	4
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	4
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	2	4
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	4	4
		15	21

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.165.688.200,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.336.388.200 terealisasi Rp. 5.022.470.267 atau 94.12 % dan Belanja langsung sebesar Rp. 4.829.300.000 terealisasi sebesar Rp. 4.374.866.008 atau 90.59%. Jadi secara keseluruhan realisasi sebesar 9.397.336.275 atau 92.44 %.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 2.621.207.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.449.764.791 dengan persentase 93.46%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		capaian (%)
		Target	Realisai		Target	Realisai	
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	500.000	497.000	99.40	100	78	78
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	199.550.000	171.770.707	86.08	12	12	100
	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	177.623.000	141.876.917	79.88	17	17	100
	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	106.038.000	81.964.600	77.30	15	15	100
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	3.110.000	3.110.000	100	12	12	100
	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.642.000	13.306.000	39.55	18	18	100
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	513.629.000	504.023.285	98.13	73	73	100
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.500.000	14.784.800	84.48	10	10	100
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.000.000	16.775.000	98.68	16	16	100
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	176.175.000	162.196.000	92.07	8	8	100
	Kegiatan penyediaan	20.000.000	15.468.000	77.34	200	216	108



	makanan dan minuman						
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000	169.811.082	99.89	45	23	51
	Kegiatan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	85.000.000	84.860.000	99.84	60	82	136
	Kegiatan penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	1.101.440.000	1.069.321.400	97.08	34	35	108

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 22.787.838 dengan persentase 91.15% yang bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Presentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal.

Tabel 2.4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	22.787.838	91.15	2	2	100

3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.928.000 dengan persentase 74.64%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari 5 dokumen, yaitu Renja 2019, Lakip, Lap Keuangan dan IKM.

Tabel 2.6

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018**

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
	Kegiatan penyusunan dokukemn perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	20.000.000	14.928.000	74.64	5	5	100

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program stretegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.670.181.200 dan terealisasi 2.534.989.638 atau 94.94%. Dalam program penataan administrasi kependudukan didalamnya terdapat 12 (duabelas) kegiatan.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6

**Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018**

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).	107.000.000	96.752.432	90.42	6	6	100
	Kegiatan peningkatan pelayanan public di bidang pendaftaran penduduk	610.000.000	573.188.623	93.97	71.000	61.492	86
	Kegiatan pengembangan database kependudukan	109.143.200	102.821.925	94.21	6	6	100
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.014.378.000	968.898.292	95.52	24	24	100
	Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil	263.100.000	260.050.000	98.84	7.650	6.462	84
	Kegiatan pengawasa dan pengendalian	138.260.000	135.564.564	98.05	2	3	150

	penduduk						
	Kegiatan peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian	75.000.000	70.424.000	93.90	200	431	215
	Kegiatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	95.000.000	88.780.500	93.45	24	24	100
	Kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	98.300.000	97.250.000	98.93	404	852	210
	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SIAK Kabupaten	50.000.000	49.113.281	98.23	2	2	100
	Kegiatan peningkatan kerjasama linas sektoral pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	60.000.000	42.877.321	71.46	5	0	0
	Kegiatan publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil	50.000.000	49.268.700	98.54	5	5	100
		2.670.181.200	2.534.989.638	94.94			

Tabel 2. 7
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1.	Gaji Pokok PNS	2.032.350.000	1.917.101.000	82.51
2.	Tunjangan Keluarga	222.900.000	216.381.078	97.08
3.	Tunjangan Jabatan	196.400.000	173.400.000	88.29
4.	Tunjangan Fungsional Umum	59.400.000	57.380.000	96.60
5.	Tunjangan Beras	135.800.000	115.365.060	84.95
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.900.000	2.846.843	72.99
7.	Pembulatan Gaji	50.000	30.243	60.49
8.	Iuran BPJS Kesehatan	63.300.000	54.018.946	85.34
9.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	20.200.000	10.931.838	54.12
10.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya	2.095.000.000	1.827.411.000	87.23
	Jumlah	4.829.300.000	4.374.866.008	90.59



D. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan (DPPA Tahun Anggaran 2018) yang dilaksanakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 belum sesuai dengan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, terdapat 2 program yang tidak memperoleh anggaran yaitu program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perbandingan antara RKPD dan DPPA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

NO	PROGRAM RKPD	PROGRAM DPPA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan

E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Salah satu indikator dalam mensukseskan dalam mencapai tujuan yang diteliti diciptakan adalah dukungan sarana dan prasarana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki asset berupa sarana dan prasarana yang meliputi :

Tabel 2.10
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan	Keterangan
1	Tanah	1.020 M2	980 M2	kurang
2	Bangunan Kantor	2	4	kurang
3	Kendaraan roda 4	5	2	kurang
4	Kendaraan roda 2	7	9	kurang
5	Mesin Ketik Elektrik	2		cukup
6	Mesin Penghitung Uang	1		cukup
7	Fotocopy	1		cukup
8	Lemari Besi	1		cukup
9	Brankas Kas	4		cukup
10	Lemari Arsip	5	7	kurang
11	Papan Pengumuman	2		cukup
1213	White Board	2		cukup
14	Genset	2		cukup
15	Lemari Kayu	1	4	kurang
16	Meja Bundar	2		cukup
17	Kursi Tamu (sopa)	3	2	kurang
18	Bangku Tunggu	10	5	kurang
19	Tenda	1		cukup
20	Kursi Kerja	24		cukup
21	Lemari Es	3	2	kurang
22	AC	24		cukup
23	Televisi	6	2	kurang
24	Sound Sistem	1		cukup
25	Wireles	2		cukup
26	UPS	4	6	kurang
27	Camera	5		cukup
28	Dispenser	2	3	kurang
29	Komputer	39	5	kurang
30	Laptop	11		
31	Card Reader	4		cukup
32	Printer	50	12	kurang
33	Scaner	4		cukup



34	Hardisk external	7		cukup
35	Meja kerja	31		cukup
36	Kursi lipat	100		cukup
37	UPS	22		cukup
38	CCTV	1		cukup
39	Televisi	3	2	kurang

Khusus untuk bangunan kantor, sudah sangat perlu untuk dibangun kembali, karena bangunan yang ada sudah ***tidak layak/tidak memadai*** untuk dipergunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan yang ada merupakan bangunan lama dimana tata ruang bangunan tersebut bukan diperuntukan untuk pelayanan yang bersifat pelayanan publik.

F. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya :

- a. Belum adanya Kepala Dinas yang definitif dan beberapa jabatan yang masih kosong
- b. Kurangnya kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan perekaman dokumen kependudukan di Kecamatan atau dikampung
- c. Masih kurangnya pegawai yang berstatus PNS
- d. Masih kurangnya tenaga ADB Kependudukan

Dari permasalahan yang ada solusi yang diambil adalah

- a. Diangkat Plt kadis dan Plh. Untuk jabatan yang kosong
- b. Menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung operasional perekaman kependudukan di Kecamatan
- c. Menggangkat tenaga kontrak harian lepas
- d. Memaksimalkan fungsi ADB





BAB III

REALISASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2018

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pemerintah dalam bidang administrasi Kependudukan meliputi 2 (dua) program, yaitu Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Namun pada tahun 2018 di Kabupaten Berau hanya melaksanakan program penataan administrasi kependudukan yang didalamnya terdapat 12 (duabelas) Kegiatan, yaitu :

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
2. Kegiatan peningkatan pelayanan public di bidang pendaftaran penduduk
3. Kegiatan pengembangan database kependudukan
4. Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
5. Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
6. Kegiatan pengawasa dan Kegiatan pengawasa dan
7. Kegiatan peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian
8. Kegiatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
9. Kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian
10. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SIAK Kabupaten
11. Kegiatan peningkatan kerjasama linstas sektoral pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
12. Kegiatan publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi RKP T1hun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).	107.000.000	96.752.432	90.42	6	6	100
2	Kegiatan peningkatan pelayanan public di bidang pendaftaran penduduk	610.000.000	573.188.623	93.97	71.000	61.492	86
3	Kegiatan pengembangan database kependudukan	109.143.200	102.821.925	94.21	6	6	100
4	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.014.378.000	968.898.292	95.52	24	24	100
5	Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil	263.100.000	260.050.000	98.84	7.650	6.462	84
6	Kegiatan pengawasa dan pengendalian penduduk	138.260.000	135.564.564	98.05	2	3	150
7	Kegiatan peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian	75.000.000	70.424.000	93.90	200	431	215
8	Kegiatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	95.000.000	88.780.500	93.45	24	24	100
9	Kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	98.300.000	97.250.000	98.93	404	852	210
10	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SIAK Kabupaten	50.000.000	49.113.281	98.23	2	2	100
11	Kegiatan peningkatan kerjasama linstas sektoral pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	60.000.000	42.877.321	71.46	5	0	0
12	Kegiatan publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil	50.000.000	49.268.700	98.54	5	5	100



C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan kepengurusan dokumen kependudukan masih terpusat di Kabupaten
3. Masih terbatasnya sarana pendukung terutama sarana mobilitas darat dalam proses perekaman langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kampung dan kecamatan.
4. Bagunan kantor sebagai sarana vital, kurang layak dalam melaksanakan pelayanan public.

Adapun solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan sosialisasi baik di Kecamatan maupun di Kampung yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dokumen kependudukan.
2. Melakukan pelayanan langsung ke masyarakat yang dipusatkan di Kampung atau kecamatan
3. Menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung pelaksanaan program perekaman langsung di kampung dan kecamatan.
4. Memaksimalkan fungsi tataruang yang ada walaupun sangat sempit .



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan **Sipil tidak ada Tugas Pembantuan** yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.



BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melaksanakan Kerja Sama atau Memorial Of Understanding (MOU) antar daerah dalam bidang urusan Administrasi Kependudukan.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam mendukung kelancaran tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu :

A. Mitra yang Diajak Kerjasama

Mitra kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (**Persero**)

B. Dasar Hukum

Nomor 415.4/245/PKS-CAPIL/2018 dan 183/TNR/SPEL/PENJ-P2/3/2018 Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Bidang Kerjasama

Objek perjanjian kerjasama adalah untuk melaksanakan layanan DOKKAR (Dokumen Oke Kami Antar) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Nama Kegiatan

Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke kecamatan atau sebaliknya di Kabupaten Berau

D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Data pegawai yang terlibat dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :



No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Anwar	Plt. Kepala Dinas
2	Ardanis, SE. M. Si	Kabid Pengelolaan data dan inovasi kependudukan
3	Amir HAmzah, SH	Kasi Kerjasama
4	Gatot Wahyudi, SE	Kasi Inovasi
5	Rusli, SE	Kasi Pemanfaatan Data
6	Budi Sidik, S. STP	FJU
7	Umi Kalsum, A. Md	FJU
8	Agus Hairuddin	FJU

F. Sumber dan Jumlah Anggaran

Seluruh biaya pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

G. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama berakhir sampai dengan 31 Desember 2018





BAB VI

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS KABUPATEN BERAU

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28,74%,

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak di sebelah utara dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hamper disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km².

Jumlah Penduduk Kabupaten Berau per Kecamatan, Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan serta Jumlah Penduduk Menurut Struktur usia berdasarkan data hasil pembersihan semester II Tahun 2018 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :



TABEL 6.1
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, 2018

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1	KELAY	5.353
2	TALISAYAN	13.215
3	SAMBALIUNG	34.316
4	SEGAH	11.655
5	TANJUNG REDEB	67.361
6	GUNUNG TABUR	22.764
7	PULAU DERAWAN	10.512
8	BIDUK BIDUK	6.186
9	TELUK BAYUR	28.537
10	TABALAR	6.524
11	MARATUA	3.427
12	BATU PUTIH	7.512
13	BIATAN	7.292
JUMLAH		224.654

TABEL 6.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	NAMA KECAMATAN	DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DUK
1	KELAY	2.917	2.436	5.353
2	TALISAYAN	7.088	6.127	13.215
3	SAMBALIUNG	18.555	15.761	34.316
4	SEGAH	6.445	5.210	11.655
5	TANJUNG REDEB	35.322	32.039	67.361
6	GUNUNG TABUR	12.434	10.330	22.764
7	PULAU DERAWAN	5.531	4.981	10.512
8	BIDUK BIDUK	3.195	2.991	6.186
9	TELUK BAYUR	15.237	13.300	28.537
10	TABALAR	3.473	3.051	6.524
11	MARATUA	1.750	1.677	3.427
12	BATU PUTIH	4.005	3.507	7.512
13	BIATAN	3.906	3.386	7.292
JUMLAH		119.858	104.796	224.654

TABEL 6.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, 2018

NO	KECAMATAN	BELUM	TIDAK	TAMAT SD	SLTP	SLTA	DIPLO MA	DIPLO MA	STRATA	STRATA	STRATA
		SEKOLAH	TAMAT SD				II	III	I	II	III
1	KELAY	1.570	972	1.352	624	673	22	29	110	1	0
2	TALISAYAN	3.191	2.421	3.681	1.767	1.726	48	93	285	3	0
3	SAMBALIUNG	8.237	5.033	7.480	5.089	7.090	156	281	926	23	1
4	SEGAH	2.878	2.160	3.204	1.590	1.557	33	60	170	3	0
5	TANJUNG REDEB	15.885	8.464	8.116	8.823	19.225	539	1.321	4.691	289	8
6	GUNUNG TABUR	5.789	3.097	4.810	3.362	4.798	112	191	591	14	0
7	PULAU DERAWAN	2.687	2.088	3.212	1.200	1.112	26	44	139	3	1
8	BIDUK BIDUK	1.428	1.104	1.758	805	852	27	53	156	3	0
9	TELUK BAYUR	6.987	3.606	4.833	4.359	7.138	157	395	1.028	32	2
10	TABALAR	1.739	1.425	1.917	692	607	15	39	87	1	2
11	MARATUA	821	814	1.086	332	311	9	10	44	0	0
12	BATU PUTIH	1.805	1.257	2.184	1.097	1.032	19	34	81	2	1
13	BIATAN	1.874	1.394	2.026	964	844	26	35	128	1	0
JUMLAH		54.891	33.835	45.659	30.704	46.965	1.189	2.585	8.436	375	15

TABEL 6.4
JUMLAH PENDUDUK PENURUT STRUKTUR USIA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, 2018

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>74
1	KELAY	277	494	506	473	448	449	460	465	511	380	319	227	132	105	59	48
2	TALISAYAN	804	1.285	1.155	1.137	1.151	1.216	1.189	1.149	1.037	916	791	550	385	223	128	99
3	SAMBALIUNG	2.315	3.455	2.904	2.925	3.252	3.215	3.144	3.156	2.798	2.419	1.800	1.194	728	475	287	249
4	SEGAH	654	1.096	973	1.091	1.083	1.054	1.114	1.083	1.016	857	628	434	249	158	91	74
5	TANJUNG REDEB	4.851	6.894	5.912	5.624	5.749	5.920	6.058	6.428	5.843	4.689	3.589	2.423	1.564	959	434	424
6	GUNUNG TABUR	1.693	2.352	1.808	1.907	2.171	2.226	2.070	2.144	1.911	1.501	1.082	722	467	299	222	189
7	PULAU DERAWAN	674	1.125	964	1.071	890	814	878	988	907	733	538	371	251	177	107	78
8	BIDUK BIDUK	395	600	537	575	507	524	466	574	462	371	368	278	199	154	79	97
9	TELUK BAYUR	2.067	2.988	2.423	2.253	2.459	2.772	2.693	2.627	2.402	1.855	1.464	945	649	430	249	261
10	TABALAR	429	649	580	592	574	559	563	546	505	434	403	226	193	134	70	67
11	MARATUA	190	344	323	357	260	290	312	309	227	192	187	142	118	86	51	39
12	BATU PUTIH	452	770	660	675	635	582	628	680	678	581	395	323	212	111	79	51
13	BIATAN	449	753	619	655	639	630	617	663	531	555	434	286	176	144	80	61



TABEL 6.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA KECAMATAN	Belum/Tidak Bekerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar/ Mahasiswa	Pensiunan	PNS	TNI	Kepolisian RI	Perdagangan	Petani/ Pekebun	Peternak	Nelayan/ Perikanan
1	KELAY	1,538	965	870	4	62	1	1	7	1,160	0	3
2	TALISAYAN	3,553	2,944	2,187	21	223	9	7	52	2,117	2	300
3	SAMBALIUNG	9,847	7,475	6,137	83	556	6	29	93	4,043	35	514
4	SEGAH	3,121	2,320	1,883	15	112	5	7	15	2,503	2	7
5	TANJUNG REDEB	19,276	13,338	12,447	454	3,073	111	322	738	914	15	232
6	GUNUNG TABUR	7,201	4,941	3,706	71	438	8	19	40	2,478	13	185
7	PULAU DERAWAN	3,054	2,514	1,820	7	107	2	9	17	416	4	1,864
8	BIDUK BIDUK	1,501	1,467	1,289	9	133	1	3	9	459	0	601
9	TELUK BAYUR	8,156	6,346	4,799	95	622	342	45	140	1,704	19	116
10	TABALAR	1,866	1,499	1,041	5	57	0	9	10	896	5	681
11	MARATUA	953	836	621	5	41	1	3	7	24	1	681
12	BATU PUTIH	1,955	1,778	1,284	7	65	1	4	21	1,018	1	348
13	BIATAN	2,055	1,648	1,133	10	67	2	2	18	1,470	1	116
JUMLAH		64,076	48,071	39,217	786	5,556	489	460	1,167	19,202	98	5,648



Lanjutan

No	KECAMATAN	Industri	Konstruksi	Transportasi	Karyawan Swasta	Karyawan BUMN	Karyawan BUMD	Karyawan Honorer	Buruh Harian Lepas	Buruh Tani Perkebunan	Buruh Nelayan Perikanan	Buruh Peternakan	Pembantu Rumah Tangga
1	KELAY	0	1	2	318	1	0	52	48	105	0	0	0
2	TALISAYAN	2	5	0	921	10	1	112	154	118	32	1	3
3	SAMBALIUNG	3	3	25	2,590	30	10	247	983	195	24	4	11
4	SEGAH	0	0	3	1,013	1	2	63	107	175	2	0	1
5	TANJUNG REDEB	18	55	45	8,166	247	103	756	2,653	157	37	2	41
6	GUNUNG TABUR	1	3	24	2,131	16	16	178	461	142	7	1	8
7	PULAU DERAWAN	0	3	1	265	6	1	72	64	24	34	0	3
8	BIDUK BIDUK	1	0	1	177	2	0	76	158	32	19	0	3
9	TELUK BAYUR	2	10	28	3,238	51	11	268	1,000	144	6	1	9
10	TABALAR	0	2	4	151	3	1	31	42	40	19	0	3
11	MARATUA	0	0	0	102	0	0	41	11	5	27	0	0
12	BATU PUTIH	0	0	0	615	3	0	29	68	53	65	2	1
13	BIATAN	1	0	6	373	4	0	57	57	97	2	0	2
	JUMLAH	28	82	139	20,060	374	145	1,982	5,806	1,287	274	11	85

LANJUTAN

No	KECAMATAN	Tukang Cukur	Tukang Listrik	Tukang Batu	Tukang Kayu	Tukang Sol Sepatu	Tukang Las Pandai Besi	Tukang Jahit	Tukang Gigi	Penata Rias	Penata Busana	Penata Rambut	Mekanik	Seniman
1	KELAY	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	TALISAYAN	1	0	7	21	0	0	2	1	2	1	0	15	0
3	SAMBALIUNG	10	2	38	60	0	7	11	1	3	0	2	45	2
4	SEGAH	2	1	2	7	0	1	0	0	0	0	0	9	0
5	TANJUNG REDEB	103	18	184	246	8	32	54	2	7	4	10	181	4
6	GUNUNG TABUR	16	0	19	69	1	2	7	0	0	1	1	26	0
7	PULAU DERAWAN	1	1	3	22	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	BIDUK BIDUK	0	0	14	49	0	5	5	0	0	0	0	5	0
9	TELUK BAYUR	11	8	32	105	0	3	14	0	1	0	4	56	0
10	TABALAR	1	0	2	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
11	MARATUA	0	0	7	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	BATU PUTIH	0	0	2	6	0	0	3	0	0	0	0	1	0
13	BIATAN	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1
	JUMLAH	18	30	316	613	9	53	97	4	13	6	17	344	8



LANJUTAN

No	KECAMATAN	Anggota DPRD Provinsi	Anggota DPRD Kab/Kota	Dosen	Guru	Pilot	Pengacara	Notaris	Arsitek	Akuntan	Konsultan	Dokter	Bidan	Perawat
1	KELAY	0	1	0	44	0	0	0	0	0	1	2	7	5
2	TALISAYAN	0	1	0	70	0	0	0	0	0	0	3	11	13
3	SAMBALIUNG	0	3	2	139	0	2	0	1	0	5	7	16	26
4	SEGAH	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	4	12
5	TANJUNG REDEB	0	9	35	459	0	6	5	3	2	31	51	38	73
6	GUNUNG TABUR	0	1	0	71	0	0	0	0	0	1	2	8	21
7	PULAU DERAWAN	0	1	0	28	0	0	0	0	0	0	1	5	2
8	BIDUK BIDUK	0	1	1	27	0	2	0	0	0	1	1	4	8
9	TELUK BAYUR	1	3	8	205	0	3	0	0	0	5	6	20	39
10	TABALAR	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	6	1
11	MARATUA	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	0	4
12	BATU PUTIH	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	2	6
13	BIATAN	0	1	0	47	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	JUMLAH	1	21	46	1,197	0	13	5	4	2	44	75	124	210



LANJUTAN

No	KECAMATAN	Apoteker	Psikiater Psikolog	Penyiar Televisi	Penyiar Radio	Pelaut	Pene liti	Sopir	Pialang	Paran ormal	Pedagang	Perangkat Desa	Kepala Desa	Biara wati	Wiras wasta	Lainnya
1	KELAY	1	0	0	0	0	0	13	0	0	11	9	5	0	96	2
2	TALISAYAN	3	0	0	0	3	0	58	0	0	47	4	2	0	157	2
3	SAMBALIUNG	3	0	0	0	1	0	167	0	0	137	5	1	0	648	1
4	SEGAH	1	0	0	0	0	0	35	0	0	7	1	2	3	156	0
5	TANJUNG REDEB	21	1	0	0	27	0	384	0	0	802	0	1	6	1,349	6
6	GUNUNG TABUR	1	0	0	0	12	0	77	0	0	50	6	0	0	287	1
7	PULAU DERAWAN	1	0	0	0	0	0	12	0	0	8	0	1	0	135	1
8	BIDUK BIDUK	0	0	0	0	3	0	25	0	0	18	3	1	0	65	3
9	TELUK BAYUR	4	0	0	0	5	0	163	0	2	228	6	0	0	447	4
10	TABALAR	0	0	0	0	1	0	15	0	0	10	3	2	0	71	0
11	MARATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	20	0
12	BATU PUTIH	2	0	0	0	6	0	31	0	0	14	0	0	0	90	1
13	BIATAN	0	0	0	0	0	0	26	0	0	9	4	0	0	60	0
	JUMLAH	37	1	0	0	58	0	1,006	0	2	1,343	42	15	9	3,581	21



Lanjutan

No	KECAMATAN	Anggota DPD	Anggota BPK	Presiden	Wakil Presiden	Anggota MK	Anggota Kabinet Kementrian	Duta Besar	Gubernur	Wakil Gubernur	Bupati	Wakil Bupati	Walikota	Wakil Walikota
1	KELAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TALISAYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SAMBALIUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SEGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANJUNG REDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
6	GUNUNG TABUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PULAU DERAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BIDUK BIDUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	TELUK BAYUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	TABALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MARATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BATU PUTIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BIATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0



Lanjutan

No	KECAMATAN	Tabib	Parajin	Perancang Busana	Penterjemah	Imam Mesjid	Pendeta	Pastor	Wartawan	Ustadz Mubaligh	Juru Masak	Promotor Acara	Anggota DPR RI
1	KELAY	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
2	TALISAYAN	0	0	1	0	1	6	4	2	3	1	0	0
3	SAMBALIUNG	0	0	0	0	5	17	0	3	6	2	0	0
4	SEGAH	0	0	0	0	3	16	0	1	0	0	0	0
5	TANJUNG REDEB	0	0	2	0	10	18	4	17	28	8	0	0
6	GUNUNG TABUR	0	0	0	0	3	6	0	1	2	0	0	0
7	PULAU DERAWAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8	BIDUK BIDUK	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
9	TELUK BAYUR	0	0	0	0	3	3	0	1	5	1	0	0
10	TABALAR	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0
11	MARATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BATU PUTIH	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
13	BIATAN	0	0	0	0	2	6	0	0	3	0	0	0
	JUMLAH	0	0	3	0	28	95	8	26	50	14	0	0







BAB VII

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

(Pada Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tidak menerima** penghargaan tingkat nasional maupun tingkat Provinsi)



BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau Tahun Anggaran 2018, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan khususnya penanganan administrasi kependudukan di Kabupaten Berau yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umum dinilai berjalan dengan baik dan lancar

B. Saran

Hasil pembangunan khususnya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dicapai pada tahun 2018, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Berau Tahun 2016 – 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.



Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau ini dapat menjadi bahan masukan terhadap LPPD Kabupaten untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.